

PENULISAN SKRIPSI

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN
SENJATA API RAKITAN DALAM MASYARAKAT HUKUM ADAT
DAYAK KENYAH DI KECAMATAN TANJUNG SELOR KABUPATEN
BULUNGAN KALIMANTAN UTARA**



Diajukan oleh :

Rya Ristiyani Maryeslin

NPM	: 170512710
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2021

PENULISAN SKRIPSI

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN
SENJATA API RAKITAN DALAM MASYARAKAT HUKUM ADAT
DAYAK KENYAH DI KECAMATAN TANJUNG SELOR KABUPATEN
BULUNGAN KALIMANTAN UTARA**



Diajukan oleh :
Rya Ristiyani Maryeslin

NPM	: 170512710
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2021

HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN
SENJATA API RAKITAN DALAM MASYARAKAT HUKUM ADAT
DAYAK KENYAH DI KECAMATAN TANJUNG SELOR KABUPATEN
BULUNGAN KALIMANTAN UTARA



Diajukan oleh :

Rya Ristiyani Maryeslin

NPM	: 170512710
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing	Tanggal	: 25 Januari 2021
-------------------------	----------------	--------------------------

Dr. C. Woro Murdiati R,S.H., M.Hum.

Tanda Tangan :

HALAMAN PENGESAHAN

PENULISAN SKRIPSI

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN
SENJATA API RAKITAN DALAM MASYARAKAT HUKUM ADAT
DAYAK KENYAH DI KECAMATAN TANJUNG SELOR KABUPATEN
BULUNGAN KALIMANTAN UTARA**



Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang di selenggarakan pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 10 Februari 2021

Susunan Tim Penguji :

Tanda Tangan

Ketua : Dr. C. Woro Murdiati R,S.H., M.Hum.

Sekretaris : Vincentius Patria Setyawan, S.H., M.H.

Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S.

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum**



Dr. Y. Sari Murti Widiyanti, S.H.,M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN SENJATA API RAKITAN DALAM MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK KENYAH DI KECAMATAN TANJUNG SELOR KABUPATEN BULUNGAN KALIMANTAN UTARA”** ini dengan baik sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Pada Program Sarjana Fakultas Hukum program kekhususan Sistem Peradilan. Selama penyusunan skripsi ini banyak rintangan dan hambatan yang dihadapi penulis, namun akhirnya dapat melalui dan menyelesaikannya dengan baik berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Ibu DR. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Ibu Dr. C. Woro Murdiati R,S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini dengan penuh kesabaran dan memberikan saran, motivasi sekaligus kritik yang membangun bagi penulis.
4. Ibu Dra. MD. Susilawati, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah banyak memberikan nasehat dan motivasi kepada penulis dalam pendidik rencana studi selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
5. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

6. Seluruh Staf Tata Usaha dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah memberikan bantuan-bantuan beserta pelayanan yang baik kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis.
8. Bapak Henoch Merang, selaku Kepala Lembaga Adat Dayak di Kalimantan Utara sebagai narasumber dari Lembaga Adat Dayak di Kalimantan Utara.
9. Bapak Bernard, selaku narasumber dari Polres Bulungan sebagai Kurbinopsnal di bidang Sat Reskrim yang merupakan posisi nomor dua di Polres Bulungan.
10. Seluruh Responden dalam penelitian hukum ini yang telah memberikan bantuan beserta informasi yang baik kepada penulis selama penulis melaksanakan penelitian.
11. Keluarga penulis yang terkasih karena tidak henti memberi semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Kepada Dita, Maureen, Devina, Maria, Arum selaku teman penulis selama kuliah di FH UAJY.
13. Kepada seluruh teman-teman PENGHUNI SURGA yang menemani penulis selama berkuliah.
14. Kepada Rinda, Yaya, Vero, Ayu, Meli selaku teman sejak SMP yang senantiasa memberikan dorongan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan semua.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun untuk melengkapi kekurangan yang ada didalam skripsi

ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat untuk menambah wawasan.

Yogyakarta, 12 Januari 2020

Penulis

Rya Ristiyani Maryeslin



ABSTRACT

The increasing number of legal problems in Indonesia which is increasingly developing is the background of this research because of the custom of the Dayak Kenyah customary community in Tanjung Selor District to use homemade firearms in hunting wild animals that are difficult to release. The research objective was to determine how the handling of criminal acts against the use of homemade firearms in the Dayak Kenyah customary law community in Tanjung Selor District, Bulungan Regency, North Kalimantan. The formulation of the problem that was taken by the researcher was how the implementation of the prevention of criminal acts against the use of homemade firearms in the Dayak Kenyah customary law community in Tanjung Selor District, North Kalimantan. The analytical method used in this research is empirical, where data is obtained from statutory regulations, books, journals, theses, the internet, interviews with the Head of the Dayak Kenyah Traditional Institute in North Kalimantan and the Bulungan Police Kurbinopsnal and filling out a questionnaire with 10 successful respondents, and willing to fill out a questionnaire from Jelarai Village because it is one that can be reached. The conclusion of this research is that the handling of criminal acts committed by the police has been carried out by means of prevention such as socialization and community approaches as well as eradication by imposing criminal sanctions on the perpetrators.

Keywords: *Crime, customary law community, homemade firearms.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Batasan Konsep	14
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Skripsi	24
BAB II PEMBAHASAN	
A. Penanggulangan Tindak Pidana terkait Penggunaan	

Senjata Api Rakitan.....	25
1. Penanggulangan	25
2. Tindak Pidana	26
3. Penanggulangan Tindak Pidana.....	31
4. Senjata Api.....	33
5. Senjata Api Rakitan.....	35
B. Tinjauan mengenai Masyarakat Hukum Adat Dayak	39
1. Pengertian Masyarakat Hukum Adat Dayak.....	39
2. Sejarah Masyarakat Hukum Adat Dayak	45
3. Mata Pencaharian Masyarakat Hukum Adat Dayak.....	46
4. Sub Suku Masyarakat Hukum Adat Dayak.....	50
C. Penanggulangan Tindak Pidana Terhadap Penggunaan Senjata Api Rakitan dalam Masyarakat Hukum Adat Dayak Kenyah di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara	53
1. Letak Geografis	53
2. Masyarakat Hukum Adat Dayak Kenyah di Kecamatan Tanjung Selor	56
3. Penggunaan Senjata Api Rakitan dalam Masyarakat Hukum Adat Dayak Kenyah di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara.....	61
4. Penanggulangan Tindak Pidana Terhadap Penggunaan Senjata	

Api Rakitan dalam Masyarakat Adat Dayak Kenyah di Kecamatan Tanjung Selor Kalimantan Utara	67
---	-----------

BAB III PENUTUP

Kesimpulan	75
Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78



DAFTAR GAMBAR

Gambar Peta Wilayah Kabupaten Bulungan.....	54
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan suatu negara hukum yang berarti dalam melakukan segala sesuatu didasarkan oleh aturan hukum yang berlaku, beberapa hukum yang dipakai Negara Indonesia hingga saat ini adalah hukum peninggalan Belanda seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sebelumnya bernama *Wetboek van Strafrecht* (WvS), HIR dan Rbg. Hukum positif yang digunakan hingga saat ini adalah untuk menciptakan kehidupan yang aman dan damai tetapi karena Indonesia belum memiliki aturannya sendiri dan agar tidak terjadi kekosongan hukum maka digunakan hukum peninggalan kolonial Belanda karena dalam pembuatan aturan baru membutuhkan waktu yang lama. Hukum peninggalan Kolonial ini digunakan untuk menyelesaikan segala masalah atau problematika hukum yang ada di Indonesia, salah satunya dalam penyelesaian suatu kasus Tindak Pidana.

Tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan istilah *strafbaarfeit* yang merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda atau yang sering digunakan adalah delik. Tujuan dari adanya pemidanaan suatu tindak pidana yang menyebabkan suatu gangguan keseimbangan dalam masyarakat, maka tujuan hukum pidana adalah mengembalikan keseimbangan yang di rusak tersebut dengan cara pencegahan, memberikan perlindungan kepada masyarakat, menjaga

solidaritas masyarakat serta terdapat keseimbangan antara perbuatan pidana dengan hukuman pidana yang dijatuhkan.¹

Peningkatan hukum pidana yang digunakan untuk menyelesaikan masalah hukum sangat diperlukan agar Indonesia memiliki aturan hukum khususnya hukum pidananya sendiri dan tidak bergantung kepada aturan hukum peninggalan kolonial Belanda secara terus-menerus. Hal ini dikarenakan semakin berkembangnya permasalahan pidana yang ada di Indonesia dan muncul berbagai masalah jenis baru dalam pidana yang sebelumnya tidak diatur didalam hukum peninggalan kolonial Belanda. Salah satu masalah pidana di Indonesia adalah kepemilikan dan penggunaan senjata api tanpa izin, bahkan selama ini kepemilikan dan penggunaan senjata api tanpa izin sering ditemui dan didasarkan oleh kepercayaan dan kebiasaan masyarakat adat yang menganggap kepemilikan dan penggunaan senjata api rakitan adalah hal yang wajar.

Kepemilikan dan penggunaan senjata api rakitan tidak hanya dilakukan dikalangan masyarakat adat atau orang awam tetapi juga dilakukan oleh beberapa Aparat Penegak Hukum (APH) yang tidak bertanggung jawab. Perbuatan ini juga menjadi penyakit yang sulit dilepaskan dari masyarakat, padahal perbuatan kepemilikan dan penggunaan senjata api secara bebas sangat berbahaya dan mengancam nyawa orang lain sehingga jika dilihat dari sisi hukum merupakan perbuatan tercela dan dapat memecah belah Bangsa Indonesia.

¹ Usman, H. 2011, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Vol-II/No-01/2011, Neliti.com, hlm. 74.

Hukum Pidana sampai saat ini belum mengatur secara tegas tentang kepemilikan senjata api baik rakitan atau tidak. Undang-Undang No.8 Tahun 1948 tentang Senjata Api, Perizinan, mencabut Peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 14 dan menetapkan Peraturan tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1948 Nomor 17) dan diperbaharui dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" telah mengatur mengenai kepemilikan senjata api.

Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Darurat No 12 Tahun 1951 menjelaskan bahwa “Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua-puluh tahun”. Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan niatan ingin menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 338 tentang menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja. Menghilangkan nyawa seseorang juga dianggap merampas hak manusia yang ingin melanjutkan hidupnya merupakan salah satu masalah pidana, karena di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur mengenai

kebebasan setiap orang untuk hidup, Pasal 28A menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidupnya.

Indonesia merupakan negara majemuk yang memiliki berbagai suku, budaya dan adat istiadat. Keberagaman suku tersebut termasuk suku Dayak Kenyah di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Tanjung Selor memiliki mayoritas suku Dayak Kenyah dan terdapat sebuah desa yang dihuni oleh mayoritas suku Dayak Kenyah yaitu Desa Jelarai. Suku Dayak Kenyah di Desa Jelarai ini termasuk dalam masyarakat hukum adat karena berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu dalam Pasal 1 butir ke-3 menjelaskan bahwa masyarakat hukum adat merupakan sekelompok orang yang terikat oleh aturan hukum adat yang berlaku sebagai warga bersama di suatu persekutuan hukum karena adanya kesamaan tempat tinggal atau keturunan dan telah memiliki kelembagaan adat.

Masyarakat hukum adat di Tanjung Selor memiliki kebiasaan dan tradisi, seperti melakukan perburuan hewan liar. Wujud kearifan lokal masyarakat hukum adat Dayak Kenyah adalah melakukan perburuan hewan liar seperti babi, rusa, monyet dan sebagainya. Kebiasaan melakukan perburuan hewan liar ini awalnya menggunakan senjata tradisional seperti tombak, sumpit, bambu dan lainnya. Seiring dengan perkembangan zaman dan masuknya modernisasi ke dalam masyarakat hukum adat Dayak Kenyah,

penggunaan alat perburuan kini berkembang menggunakan senjata api rakitan dan hal ini merupakan hal yang dianggap wajar dalam masyarakat hukum adat Dayak Kenyah.

Keberadaan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dianggap mampu mengatur tentang kepemilikan dan penggunaan senjata api dalam masyarakat, tidak hanya masyarakat hukum adat saja tetapi kepada seluruh masyarakat dan dengan adanya Undang-Undang ini masyarakat dianggap telah mengetahui bahwa memiliki, membuat, mengedarkan atau menggunakan senjata api tanpa izin merupakan hal yang dilarang dan dapat dihukum.

Masyarakat hukum adat Dayak Kenyah yang dianggap telah mengetahui Undang-Undang tersebut tetap melakukan atau melanggar aturan yang ada maka dari itu, hal ini menjadi persoalan hukum yang cukup sulit karena untuk menghilangkan atau membiasakan masyarakat tidak menggunakan senjata api rakitan secara bebas menjadi hal yang tidak mudah dan melihat bahwa beberapa oknum Aparat Penegak Hukum (APH) kurang tegas dalam pelarangan kepemilikan dan penggunaan senjata api ini. Hal ini juga bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam Pancasila yaitu norma agama, kesusilaan, kesopanan dan hukum, didalam norma hukum baik tertulis maupun tidak tertulis pasti memberikan larangan dalam bertindak agar tidak merugikan atau merusak norma lainnya karena norma hukum digunakan sebagai senjata terakhir dalam menyelesaikan masalah dalam masyarakat, oleh karena itu aturan dalam masyarakat hukum adat Dayak Kenyah yang

bentuknya tidak tertulis juga pasti melarang perbuatan yang bertentangan dengan keadaan lingkungan atau merugikan lingkungan adatnya. Walaupun demikian, dalam pelaksanaannya setiap orang memiliki cara masing-masing untuk bertahan hidup, seperti kebiasaan masyarakat hukum adat Dayak Kenyah yang terbiasa melakukan perburuan liar.

Perkembangan Hukum Pidana dalam masyarakat selalu diikuti dengan perkembangan kejahatan atau tindak pidana. Oleh karenanya perlu diketahui lebih jauh mengenai tindak pidana kepemilikan dan penggunaan senjata api rakitan secara bebas serta peraturan apa saja yang digunakan untuk upaya penanggulangannya oleh penegak hukum. Berdasarkan hal tersebut penulis mengajukan skripsi yang berjudul “Penanggulangan Tindak Pidana Terhadap Penggunaan Senjata Api Rakitan dalam Masyarakat Hukum Adat Dayak Kenyah di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan isi latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan penanggulan tindak pidana terhadap penggunaan senjata api rakitan dalam masyarakat hukum adat Dayak Kenyah di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana penanggulangan tindak pidana terhadap penggunaan

senjata api rakitan dalam masyarakat hukum adat Dayak Kenyah di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat dari segi teoritis dan praktis.

1. Manfaat teoritis

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum tertentu pada khususnya hukum pidana yang terkait dengan penanggulangan tindak pidana terhadap penggunaan senjata api rakitan dalam masyarakat hukum adat Dayak Kenyah di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara.

2. Manfaat praktis :

- a. Pemerintah Daerah, agar dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan mengenai pentingnya penanggulangan penggunaan senjata api rakitan dalam masyarakat, khususnya masyarakat hukum adat Dayak di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara.
- b. Aparat Penegak Hukum, agar dapat memberikan informasi kepada para penegak hukum setempat tentang pentingnya upaya penanggulangan tindak pidana terhadap penggunaan senjata api rakitan dalam masyarakat hukum adat Dayak Kenyah di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara dan meningkatkan keamanan serta keadilan masyarakat dan lebih

menegaskan dalam menanggulangi beredarnya senjata api rakitan secara ilegal dalam masyarakat.

- c. Masyarakat Hukum Adat Dayak Kenyah, memberikan wawasan dan pengetahuan bahwa kepemilikan senjata api rakitan tanpa izin merupakan suatu perbuatan tindak pidana dan peran Aparat Penegak Hukum (APH) dalam menangani persoalan penggunaan senjata api rakitan dalam masyarakat hukum adat Dayak Kenyah di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara.
- d. Bagi penulis, agar semakin menambah wawasan penulis mengenai upaya penanggulangan tindak pidana terhadap penggunaan senjata api rakitan dalam masyarakat hukum adat Dayak Kenyah di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara dan meningkatkan keamanan bagi masyarakat hukum adat itu sendiri.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum dengan judul penanggulangan tindak pidana terhadap penggunaan senjata api rakitan dalam masyarakat hukum adat Dayak Kenyah di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara. Karya ini merupakan hasil pemikiran penulis sendiri dan bukan merupakan plagiasi. Sebagai pembanding, sumber yang digunakan dalam penulisan penelitian ini ada tiga penulisan hukum yang membedakan dengan penelitian hukum ini :

- 1. Disusun oleh : Muh. Abdillah Fadlyansyah
- NPM : B 111 11 148
- Instansi : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar

Penelitian Tahun : 2015

Judul : Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan
Senjata Api.

a. Rumusan Masalah

- 1) Apa sajakah faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan senjata api di kota Makassar?
- 2) Bagaimanakah upaya penanggulangan penyalahgunaan senjata api di kota Makassar?.

b. Hasil penelitian

Penerapan sanksi pidana dalam putusan Nomor 853/Pid.B/2017/PN Pdg dan putusan Nomor 129/Pid.Sus/2016/PN Kag merupakan tindak pidana yang telah terbukti dan meyakinkan bagi Majelis Hakim untuk memvonis terdakwa dengan tindak pidana tanpa hak untuk menyimpan dan membawa senjata api sebagaimana mestinya yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pembedaan terhadap kedua pelaku dalam putusan Nomor 853/Pid.B/2017/PN Pdg dan putusan Nomor 129/Pid.Sus/2016/PN Kag berdasarkan 2 (dua) jenis pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam persidangan.

Pertimbangan non yuridis adalah keadaan yang berkaitan dengan diri terdakwa seperti latar belakang terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dampak dari perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana.²

Persamaan antara penelitian hukum penulis dengan penelitian hukum dari Muh. Abdillah Fadlyansyah adalah dalam hal kepemilikan senjata api oleh masyarakat tanpa adanya izin resmi agar dapat memiliki dan menggunakan senjata api.

Perbedaannya adalah dari obyeknya, penulis menekankan pada masyarakat adat Dayak Kenyah di Kecamatan Tanjung Selor sedangkan dalam penelitian Muh. Abdillah Fadlyansyah ini tidak menyebutkan secara spesifik dan hanya menjelaskan secara umum mengenai Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api dalam masyarakat.

2. Disusun oleh : Doris Manggalang Raja Sagala
NPM : 100510361
Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta
Penelitian Tahun : 2014
Judul Skripsi : Upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta
Dalam Menanggulangi Kejahatan Menggunakan
Senjata Api

² Muh. Abdillah Fadlyansyah, 2015, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api*, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makasar, hlm. 3.

a. Rumusan masalah

- 1) Bagaimana upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi kejahatan menggunakan senjata api?
- 2) Apa saja kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi kejahatan dengan menggunakan senjata api?

b. Hasil penelitian

Upaya Yogyakarta untuk menyelesaikan kejahatan dengan menggunakan senjata api datang saat ini, tetapi juga Polri tetap harus memperhatikan HAM. Kendala internal terkait izin yang dihadapi Polri saat ini bukan merupakan rekomendasi polisi digunakan polisi di daerah, penulis menyarankan agar Polri harus Mabes Polri lebih memperhatikan rekomendasi menurut jumlah penduduk di KTP. Berhubungan dengan Kendala eksternal, dualisme keagenan dapat memberikan izin kepemilikan dan penggunaan senjata api yang menurut Kepala Polisi dan Sekretaris Pertahanan, kerja sama antara Mabes Polri dengan Kementerian Pertahanan lebih ditingkatkan untuk mencegah penyalahgunaan senjata api.³

Persamaan antara penelitian hukum penulis dengan penelitian hukum dari Doris Manggalang Raja Sagala adalah dalam hal upaya dalam menanggulangi kepemilikan senjata api illegal oleh masyarakat daerah tertentu oleh penegak hukum.

³ Doris Manggalang Raja Sagala, 2014, *Upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Menanggulangi Kejahatan Menggunakan Senjata Api*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 9.

Perbedaannya adalah penulis lebih menekankan pada senjata api ilegal yang dirakit sendiri oleh masyarakat adat setempat dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat adat itu sendiri sedangkan menurut penelitian hukum Doris Manggalang Raja Sagala lebih menekankan pada upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Menanggulangi Kejahatan Menggunakan Senjata Api, lebih spesifik terhadap kejahatan yang timbul karena senjata api itu.

3. Disusun oleh : Wahyu Donri Tinambunan
NPM : 060509451
Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta
Penelitian tahun : 2010
Judul Skripsi : Peranan Dan Tindakan Kepolisian Mengendalikan
dan Menanggulangi Senjata Api Ilegal Yang
Dilakukan Oleh Warga Sipil

a. Rumusan masalah

- 1) Apakah tindakan yang diambil oleh Kepolisian terhadap penyalahgunaan senjata api ilegal oleh warga sipil?
- 2) Kendala apakah yang dihadapi oleh Kepolisian dalam mengungkap atau menanggulangi peredaran senjata api secara ilegal?

b. Hasil penelitian

Hasil dari penelitian ini adalah tujuan dan penataan senjata api, hal-hal yang menjadi penyebabnya penggunaan sipil senjata api ilegal dan faktor-faktornya, tindakan polisi preventif dan represif terhadap penyalahgunaan senjata api. Penulis juga mempunyai saran dari penulisan ini yaitu: peran masyarakat untuk lebih aktif memberikan informasi tentang peredaran senjata api ilegal, pembentukan badan khusus yang menangani peredaran senjata api ilegal di wilayah Republik Indonesia, dan juga memperketat perbatasan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diduga sebagai tempat masuknya senjata api ilegal wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴

Persamaan antara penelitian hukum penulis dengan penelitian hukum Wahyu Donri Tinambunan adalah dalam hal kepemilikan dan penyalahgunaan senjata api secara ilegal oleh masyarakat. Serta adanya upaya kepolisian atau aparat penegak hukum untuk mengurangi dan memberantas penyebaran senjata api ilegal yang dianggap merugikan orang lain atau pihak yang terkait.

Perbedaannya adalah penelitian hukum penulis menekankan pada bagaimana penanggulangan tindak pidana mengenai kepemilikan senjata api rakitan dalam masyarakat hukum adat. Sedangkan menurut penelitian hukum Wahyu Donri Tinambunan lebih menekankan peran pemerintah dalam mengatasi kepemilikan senjata api ilegal dan masyarakat untuk lebih aktif memberikan informasi tentang peredaran

⁴ Wahyu Donri Tinambunan, 2010, *Peran dan Tindakan Kepolisian Mengendalikan dan Menanggulangi Senjata Api Ilegal yang Dilakukan oleh Warga Sipil*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 13.

senjata api ilegal, pembentukan badan khusus yang menangani peredaran senjata api ilegal di wilayah Republik Indonesia, penulis juga menggunakan UUD 1945 dalam penulisan tetapi tidak menjelaskan spesifik hanya membahas UUD 1945 secara umum.

F. Batasan Konsep

1. Penanggulangan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan penanggulangan adalah proses, cara, perbuatan menanggulangi. Penanggulangan dapat diartikan sebagai berbagai upaya pencegahan atau mengatasi suatu keadaan dan berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang dianggap salah.⁵

2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana menurut Pompe merupakan “suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tata tertib huku yang dengan sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh seseorang dan dalam penjatuhan hukuman dari perbuatan tersebut dilakukan demi terciptanya tertib hukum”.⁶

3. Penanggulangan Tindak Pidana

Penanggulangan Tindak Pidana merupakan suatu usaha untuk mencegah atau mengatasi terjadinya suatu kejahatan atau pelanggaran dalam masyarakat. Ruang lingkup upaya penanggulangan tindak pidana untuk mengatasi kejahatan menurut G.P Hoefnagels adalah sebagai berikut :

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://typoonline.com/kbbi/penanggulangan>, diakses tanggal 8 Oktober 2020.

⁶ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, Hukum Pidana, Cetakan Kesatu, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 98.

- a. Penerapan hukum pidana
- b. Pencegahan tanpa pidana
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedanaan lewat media massa.⁷

4. Senjata Api

Pasal 1 ayat (2) UU No.12/Drt/1951 tentang Senjata Api telah menunjukkan peraturan mengenai pengertian senjata api yaitu didalam pasal 1 ayat (1) dari Peraturan Senjata Api 1936 (Stbl.1937 No.170), yang telah diubah dengan *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (Stbl.No.278) yang pada dasarnya menjelaskan bahwa yang termasuk dalam pengertian senjata api adalah seluruh bagian senjata yang memiliki tekanan udara dan per serta benda lain yang menyerupai memberikan keadaan berbahaya sehingga tidak dapat digunakan oleh masyarakat sipil.

5. Senjata Api Rakitan

Senjata api rakitan merupakan bagian dari senjata api dan tidak memiliki izin (ilegal) karena merupakan hasil buah tangan dari seseorang atau ahli pembuat senjata api rakitan yang tidak memiliki izin praktek pembuatan senjata atau tidak melalui proses persyaratan yang sangat ketat dari pihak kepolisian yang mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 82 Tahun 2004 yang telah di perbarui menjadi Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2015

⁷ John Kenedi, 2017, "Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) dalam Negara Hukum Indonesia : Upaya Mensejahterakan Masyarakat (*Social Welfare*), *AL-IMARAH :Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol-II/No-1/2017, Fakultas Studi Hukum Tata Negara Pascasarjana IAIN Bengkulu, hlm. 19.

tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/Polri.⁸

6. Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu menjelaskan dalam Pasal 1 butir 3 mengatur mengenai pengertian masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat yang dimaksud dalam pasal ini adalah sekelompok orang yang terikat oleh aturan hukum adat yang berlaku sebagai warga bersama di suatu persekutuan hukum karena adanya kesamaan tempat tinggal ataupun karena adanya dasar keturunan.

7. Masyarakat Hukum Adat Dayak Kenyah

Masyarakat Hukum Adat Dayak Kenyah adalah salah satu sub Suku Dayak di Kalimantan Timur yang berjumlah cukup besar dan terbagi lagi dalam beberapa kelompok yang memberi identitas dari kelompoknya atau biasa disebut *Uma* (Ladang) atau *Leppo* (Perkampungan).⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang

⁸ Adilan Bill Azmy, Cara Mengurus Izin Kepemilikan Senjata Api, <https://tirto.id/cara-mengurus-izin-kepemilikan-senjata-api-bagi-warga-sipil-ekjQ>, tanggal akses 23 September 2020.

⁹ I. Samsoedin, dkk, 2010, "Konsep Tata Ruang dan Pengelolaan Lahan Pada Masyarakat Dayak Kenyah di Kalimantan Timur", *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, Vol-VII/No-02/Agustus/2010, hlm. 148.

didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier terkait upaya penanggulangan tindak pidana terhadap penggunaan senjata api rakitan dalam masyarakat hukum adat Dayak Kenyah di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara.

2. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian empiris ini adalah data primer sebagai data utama dan bahan hukum sekunder yang berupa bahan hukum yang dipakai sebagai pendukung.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti. Pengumpulan data ini dilakukan melalui kuesioner dan wawancara mengenai upaya penanggulangan tindak pidana terhadap penggunaan senjata api rakitan dalam masyarakat hukum adat Dayak Kenyah di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara tahun 2020.
- b. Data sekunder yaitu data yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
 - 1) Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, peraturan kebijakan dan/atau perizinan, putusan lembaga peradilan, putusan lembaga penyelesaian sengketa, kontrak, Hukum Agama, Hukum Adat dan Hukum Internasional, yang terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) perihal Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya; Pasal 28 A perihal setiap orang berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya; Pasal 28 I ayat (3) perihal identitas budaya dan hak masyarakat tradisional yang dihormati selaras dengan perkembangan zaman; Pasal 32 ayat (1) perihal negara yang menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai budayanya; Pasal 32 ayat (2) perihal negara menghormati dan memelihara Bahasa daerah sebagai kekayaan budaya.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 1 ayat (1) perihal asas legalitas yaitu tidak ada kejahatan tanpa Undang-Undang; Pasal 1 ayat (2) perihal jika terjadinya perubahan Undang-Undang maka yang diterapkan adalah ketentuan yang paling menguntungkan terdakwa; Pasal 10 perihal stelsel pidana yaitu pidana pokok dan tambahan; Pasal 338 perihal menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja.
- c) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang R.I Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 Pasal 1 ayat (1) perihal hukuman terhadap

pelanggar Undang-Undang ini; Pasal 1 ayat (2) perihal pengertian senjata api dan amunisi.

- d) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 67 ayat (1) mengenai hak masyarakat hukum adat.
- e) Peraturan Kapolri Nomor 82 Tahun 2004 yang telah diperbaharui menjadi Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Polri/TNI untuk Kepentingan Bela Diri Pasal 8 ayat (1) perihal persyaratan untuk dapat memiliki dan menggunakan senjata api non organik untuk kepentingan bela diri.
- f) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu dalam Pasal 1 ayat 3 perihal pengertian masyarakat hukum adat; Pasal 4 ayat (1) perihal ciri dari masyarakat hukum adat.
- g) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/Polri dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api bagi Pengemban Fungsi Kepolisian Lainnya Pasal 12 ayat (1)

perihal prosedur izin kepemilikan senjata api; Pasal 14 ayat (1)

perihal prosedur izin penggunaan senjata api.

- 2) Bahan hukum sekunder adalah dokumen hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum yang meliputi pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, majalah ilmiah, risalah, naskah otentik, data statistik dari instansi/Lembaga resmi, kamus, dan nara sumber.

3. Cara Pengumpulan Data

Jenis penelitian hukum empiris menggunakan metode pengumpulan data yang terdiri dari data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer dikumpulkan dengan menggunakan cara kuisisioner dan wawancara.

- 1) Kuesioner yaitu daftar pertanyaan yang dibuat secara tertulis dan diajukan kepada responden guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan ini dan berkaitan dengan upaya penanggulangan tindak pidana terhadap penggunaan senjata api rakitan oleh masyarakat hukum adat Dayak Kenyah di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara.

- 2) Wawancara yaitu suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber yang berkaitan dengan upaya penanggulangan tindak pidana terhadap penggunaan senjata api rakitan oleh masyarakat

hukum adat Dayak Kenyah di Kecamatan Tanjung Selor
Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara.

b. Data Sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, pendapat hukum dan hasil penelitian yang berkaitan dengan upaya penanggulangan tindak pidana terhadap penggunaan senjata api rakitan oleh masyarakat hukum adat Dayak Kenyah di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara.

4. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan lokasi penelitian adalah Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara. Kecamatan Tanjung Selor terdiri dari 3 kelurahan dan 6 desa. Dari 6 desa yang ada diambil satu desa secara purposive yang berarti peneliti menggunakan pertimbangan sendiri dengan berbekal pengetahuan yang cukup tentang Tanjung Selor untuk memilih salah satu dari 6 desa yang ada. Desa yang dipilih yaitu desa Jelarai Selor karena desa ini termasuk salah satu yang dapat dijangkau dan diberikan akses masuk, desa ini terletak di pelosok Kecamatan Tanjung Selor.

5. Populasi

Populasi yang di ambil dalam penelitian hukum ini adalah dari masyarakat hukum adat Dayak Kenyah di Desa Jelarai Selor karena Desa Jelarai Selor didominasi oleh masyarakat hukum adat Dayak Kenyah. Desa Jelarai Selor memiliki jumlah penduduk sebanyak 4.968 jiwa

dengan jumlah kepala keluarga saat ini mencapai 1.293 dengan jumlah laki-laki 2.639 jiwa dan perempuan 2.329 jiwa yang tersebar dalam 42 RT.

6. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi. Penentuan sampel dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan metode non random. Metode non random adalah penarikan data dengan tidak memberikan peluang yang sama kepada seluruh populasi untuk dipilih sebagai sampel. Teknik sampel non random dalam penelitian ini adalah teknik sampel purposive. Sampel purposive adalah penentuan sampel yang disesuaikan dengan kriteria dari judul penelitian. Sampel dari populasi ini adalah seluruh masyarakat hukum adat Dayak Kenyah di Tanjung Selor Kalimantan Utara yang memiliki mata pencaharian dari alam untuk memenuhi kebutuhannya dengan menggunakan senjata api rakitan seperti berburu, menjaga perkebunan menggunakan senjata api rakitan atau termasuk yang memenuhi ciri atau kriteria sesuai dengan judul penulisan hukum penulis, yaitu :

- a. Merupakan penduduk asli daerah Tanjung Selor Desa Jelarai Kalimantan Utara.
- b. Merupakan suku Dayak Kenyah asli.
- c. Memiliki mata pencaharian dengan memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) seperti bertani, berkebun dan berburu.

d. Memiliki senjata api rakitan dan menggunakannya untuk bertani, berkebun ataupun berburu.

7. Responden

Responden dalam penelitian ini yaitu 10 orang masyarakat hukum adat Dayak Kenyah yang berhasil dan bersedia ditemui dan mengisi kuesioner dari penulis di Desa Jelarai Selor dan memenuhi kriteria dari judul penulisan hukum ini.

8. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah :

- a. Bapak Bernard yang menjabat sebagai Kurbinopsnal Polres Bulungan yang merupakan posisi nomor dua di bidang Sat Reskrim Polres Bulungan.
- b. Bapak Henoch Merang yang menjabat sebagai Ketua Lembaga Adat Dayak Kenyah di Kalimantan Utara.

9. Analisis data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan mengkaji data yang telah diperoleh secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah yang diteliti. Dalam menarik kesimpulan dipergunakan metode berfikir secara deduktif yaitu berawal dari proposisi umum kemudian berakhir pada kesimpulan yang bersifat lebih khusus. Dalam hal ini proposisi umum berupa peraturan peraturan perundang-undangan di bidang upaya penanggulangan tindak

pidana terhadap penggunaan senjata api rakitan dalam masyarakat hukum adat Dayak Kenyah di Tanjung Selor Kalimantan Utara.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Dalam sub bab ini penulis menjelaskan mengenai sistematika penulisan Skripsi ini yaitu :

BAB I, dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, sistematika penulisan hukum.

BAB II, dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai bagaimana tindakan penanggulangan tindak pidana terhadap penggunaan senjata api rakitan dalam masyarakat hukum adat Dayak Kenyah di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara.

BAB III, dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran terhadap berbagai upaya dalam tindakan penanggulangan tindak pidana terhadap penggunaan senjata api rakitan dalam masyarakat hukum adat Dayak Kenyah di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tindakan pencegahan yang dilakukan adalah dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai aturan dan akibat dari penggunaan senjata api rakitan, kegiatan sosialisasi ini diawali dengan pendekatan kepada masing-masing ketua adat di daerah terkait sehingga dalam upaya pencegahan ini tidak menemui kendala karena masyarakat hukum adat saat ini sudah bisa menerima adanya hukum nasional yang mengatur dalam berperilaku.

Upaya pemberantasan kepemilikan dan penggunaan senjata api rakitan juga dilakukan oleh pihak kepolisian dengan berdasar pada Undang-Undang yang berlaku sehingga para pihak yang memiliki dan menggunakan senjata api rakitan ini semakin berkurang karena tindakan ini dapat membahayakan pemilik maupun orang lain. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa upaya pelaksanaan penanggulangan tindak pidana terhadap penggunaan senjata api rakitan dalam masyarakat hukum adat Dayak Kenyah di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara dilakukan dengan cara preventif (pencegahan) seperti sosialisasi maupun pendekatan ke masyarakat dan represif (memberantas) seperti penjatuhan sanksi pidana kepada pihak yang menggunakan senjata api rakitan ini.

B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut diatas, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Masyarakat hukum adat dalam melakukan kegiatan pemenuhan kebutuhan hidupnya sebaiknya tidak menggunakan senjata api rakitan karena perbuatan memiliki dan menggunakan senjata api rakitan merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan sebaiknya menggunakan cara lain yang lebih aman dan tidak melanggar tindak pidana seperti penggunaan jerat atau perangkap, tombak dan lainnya sepanjang tidak di larang oleh Undang-Undang.
2. Pihak kepolisian sebagai pihak yang berwenang sebaiknya lebih tegas dalam mengambil tindakan pemberantasan dan meningkatkan upaya pencegahan dengan cara sosialisasi ke masyarakat pedalaman yang belum mengetahui bahaya dari senjata api rakitan agar kepemilikan serta penggunaan senjata api rakitan dapat berkurang.
3. Pemerintah Daerah setempat lebih memperhatikan keadaan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas agar masyarakat hukum adat Dayak di Kecamatan Tanjung Selor tidak hanya bergantung pada alam dan menggunakan senjata api rakitan untuk memenuhinya.
4. Lembaga Adat Dayak Kenyah meningkatkan kerjasama dengan pihak kepolisian dalam pelaksanaan penyuluhan atau sosialisasi dan

melakukan pendekatan lebih ke masyarakat hukum adat Dayak
Kenyah di Tanjung Selor.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- A. Josias Simon Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti, 2015, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Edisi Pertama, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Cetakan Kesatu, Pustaka Pena Press, Makassar.
- Andi Widjajanto, 2013, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Senjata Api dan Bahan Peledak*, Kementrian Hukum dan HAM RI, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta.
- Bewa Ragawino, 2008, *Buku Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

Peraturan Kapolri Nomor 82 Tahun 2004 yang telah diperbaharui menjadi Peraturan Kapolri Nnomor 18 Tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Polri/TNI untuk Kepentingan Bela Diri;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu;

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/Polri dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api bagi Pengemban Fungsi Kepolisian Lainnya.

Jurnal

Adi Hermansyah, 2013, “Penanggulangan Kejahatan Pidana Badan di Indonesia”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15 Nomor 60 Agustus 2013, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

Dian Rahadian dan Nyoman Serikat Putra Jaya, 2014, “Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Politik”, *Law Reform*, Vol. 9 Nomor 2 Januari 2014, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

- Ernest Runtukahu, 2017, “Beberapa Aspek tentang Delik Senjata Api, Munisi dan Bahan Peledak di Indonesia”, *Lex Crimen*, Vol. 6 Nomor 4 Juni 2017, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- Hamid Darmadi, 2016, “Dayak Asal-Usul dan Penyebarannya di Bumi Borneo”, *Jurnal Pendidikan Sosial*, Vol. 2 Nomor 2 Desember 2016, Program Studi PPKn Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial IKIP PGRI Pontianak.
- I.Samsoedin, dkk, 2010, “Konsep Tata Ruang dan Pengelolaan Lahan Pada Masyarakat Dayak Kenyah di Kalimantan Timur”, *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, Vol. 7 Nomor 2 Agustus 2010.
- I. Sriyanto, 1991, “Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional (Sumbangan Pemikiran Bagi Pembentukan KUHP Nasional)”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 2 Nomor 3 1991, Hukum Pembangunan.
- Jawahir Thontowi, 2015, “Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya”, *Pandecta*, Vol. 10 Nomor 1 Juni 2015, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- John Kenedi, 2017, “Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) dalam Negara Hukum Indonesia : Upaya Mensejahterakan Masyarakat (*Social Welfare*), *AL-IMARAH :Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 2 Nomor 1, 2017, Fakultas Syariah IAIN Bengkulu.
- Mochamad Adib Zain dan Ahmad Siddiq, 2015, “Pengakuan atas Kedudukan dan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Pasca dibentuknya Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 2 Nomor 2 Juli 2015, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Nurdinah Muhammad, 2017, “Resistensi Masyarakat Urban dan Masyarakat Tradisional dalam Menyikapi Perubahan Sosial”, *Jurnal Substantia*, Vol. 19 Nomor 2 Oktober 2017, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Robby Dwy Karyadi, 2017, “Eksistensi Kearifan Lokal Tato Masyarakat Suku Dayak Iban di Provinsi Kalimantan Barat Setelah Berlakunya Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-048/A/J.A/12/2011 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia”, *Jurnal UAJY*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Saefuddin, 2019, “Kearifan Tradisi Masyarakat Dayak Deah Di Kalimantan Selatan”, *Tuah Talino*, Vol. 13 Nomor 2 Desember 2019, Balai Bahasa Kalimantan Barat.
- Sigit Agung Susilo, 2016, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan BBM Subsidi di Nusa Tenggara Timur”, *Jurnal UNDIP*, Jilid 45 Nomor 3 Juli 2016, Program Pasca Sarjana Universitas Nusa Cendana.
- Sri Harini Dwiyatmi dan R.E.S Fobia, 2019, “Restorasi Materi Pengajaran Hukum Adat”, *Jurnal Ilmu Hukum Alethea*, Vol. 3 Nomor 1 Agustus 2019, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana.
- Usman, H. 2011, “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Vol. 2 Nomor 1, 2011, Neliti.com.

Yahya Ahmad Zein dan Dewi Nurvianti, 2017, “Konsepsi Hak Masyarakat Hukum Adat sebagai Hak Asasi Manusia dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Veritas et Justitia*, Vol. 3 Nomor 2 Desember 2017, Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan.

Yoanda Eka S, dkk, 2020, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Wanita yang Melakukan Perkosaan Terhadap Laki-Laki”, *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 2 Nomor 1 Maret 2020, Fakultas Hukum Universitas Balikpapan.

Yusuf Salamat, 2016, “Pengaturan Mengenai Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat (Studi Kasus Pengakuan Terhadap Hak atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dayak di Kalimantan Tengah)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 Nomor 4 Desember 2016, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah.

Skripsi

Doris Manggalang Raja Sagala, 2014, *Upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Menanggulangi Kejahatan Menggunakan Senjata Api*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Muh. Abdillah Fadlyansyah, 2015, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api*, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar.

Wahyu Donri Tinambunan, 2010, *Peran dan Tindakan Kepolisian Mengendalikan dan Menanggulangi Senjata Api Ilegal yang Dilakukan oleh Warga Sipil*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Internet

Adilan Bill Azmy, Cara Mengurus Izin Kepemilikan Senjata Api, <https://tirto.id/cara-mengurus-izin-kepemilikan-senjata-api-bagi-warga-sipil-ekjQ>, tanggal akses 23 September 2020.

Dunia Pendidikan, <https://duniapendidikan.co.id/asal-usul-suku-dayak/>, diakses tanggal 26 Januari 2021.

Eka Hindrati, Kongres Masyarakat Adat Nusantara I : Gugatan Masyarakat Adat Nusantara untuk Negara Indonesia, <http://www.aman.or.id/2019/03/kongres-masyarkat-adat-nusantara-i-gugatan-masyarakat-adat-nusantara-untuk-negara-indonesia/#:~:text=Selama%20tanggal%205%20sampai%2022,Masyarakat%20Adat%20dari%20seluruh%20nusantara.&text=Saat%20ini%2C%20dalam%20usinya%20yang,AMAN%20memiliki%20anggota%202366%20komunitas>, tanggal akses 12 Januari 2021.

Institut Dayakologi, 2017, Sistem Religi, <http://kebudayaan-dayak.com/budaya/0-1/sistem-kepercayaan.html>, diakses tanggal 19 Januari 2021.

Institut Dayakologi, 2017, Sistem Pengetahuan, <http://kebudayaan-dayak.com/budaya/0-24/bercocok-tanam.html>, diakses tanggal 25 Januari 2021.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://typoonline.com/kbbi/penanggulangan>, diakses tanggal 8 Oktober 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kata.web.id/?s=senjata+api>, diakses tanggal 23 September 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kata.web.id/satwa-liar/>, diakses tanggal 24 September 2020.

Vannisa, Suku Dayak, <https://perpustakaan.id/suku-dayak/#:~:text=Kebudayaan%20Suku%20Dayak%20%3A&text=Selain%20dikenal%20sebagai%20manusia%20primitif,musik%20dan%20masih%20banyak%20lagi.>, diakses tanggal 25 Januari 2021.

Website Resmi Pemerintah Kabupaten Bulungan, 2019, <https://bulungan.go.id/v5/index.php/bulungan/letak-dan-batas-wilayah>, diakses tanggal 11 Januari 2021.

Website Resmi Pemerintah Kabupaten Bulungan, 2014, Potensi Wilayah, <https://www.bulungan.go.id/v5/index.php/potensi-wilayah?start=10>, diakses tanggal 19 Januari 2021.

Wiro Hamjen, Artikel Mengenal 7 Rumpun Suku Dayak di Pulau Kalimantan, <https://www.hipwee.com/list/mengenal-7-rumpun-suku-dayak-di-pulau-kalimantan/>, diakses tanggal 26 Januari 2021.